KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI TERPIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh : Ibnu Sya'ban Syah J

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M

Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH.

Alamat : Jl. Suka Jaya, Kota Pekanbaru.

Email : ibnusyakbansyah@yahoo.com. Telepon : 0896-2148-7430

ABSTRACT

Legal certainty regarding the execution of death row in Indonesian criminal law is not regulated regarding the period of execution of decisions that have permanent legal force. This makes the time limit for execution even more unclear because there is no definite legal basis. In this way the law also seems to allow uncertainty regarding the execution deadline. The long delay has reached many years even though the verdict has permanent legal force and there are convicts who did not take extraordinary legal remedies or file for clemency. Detention in a prison that lasts a long time and is not certain to indicate a conflict with the principle of legal certainty.

This research is a normative legal research. Legal research carried out by examining mere library materials or secondary data, can be called normative legal research or library legal research (in addition to sociological or empirical legal research that primarily examines premiere data). This research uses a research methodology on legal principles.

Based on the results of the study it can be seen that the legal certainty of the execution of death row in Indonesian criminal law up to now violates many human rights both in its regulation and application. The delay on protracted executions has a close relationship with legal certainty. This can be seen from how long the convict must wait in prison to be executed and whether the death row inmate will be executed or not. The uncertainty in the execution of capital punishment certainly is contrary to the legal certainty of a just criminal law enforcement process. Ideal arrangements regarding the implementation of capital punishment should be immediately carried out in accordance with predetermined rules, so that the creation of legal certainty for the execution of death row inmates until the future.

Keywords: Legal Certainty, Death Penalty, Execution

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan, yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya.

Pidana mati memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Dalam perkembangannya, hukuman mati di dunia dilakukan dengan berbagai cara seperti penyaliban, ditenggelamkan, dipukuli sampai mati, dibakar hidup-hidup dan dilempari sampai mati, disetrum, diracun, digantung, dan ditembak mati. Di Indonesia, pada awalnya eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana. Namun, setelah dilegalkannya Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) tahun 1964, eksekusi pidana mati tersebut berubah dari hukum gantung menjadi pidana mati dengan menembak mati terpidana.¹

Penundaan yang lama tersebut ada yang mencapai bertahun-tahun padahal putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan ada terpidana yang tidak mengambil upaya hukum luar biasa ataupun mengajukan grasi. Penahanan di dalam lembaga pemasyarakatan yang berlangsung lama dan tidak pasti menunjukkan adanya pertentangan terhadap asas kepastian hukum. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat

permasalahan ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian yaitu “**Analisis Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana mati?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal tentang pelaksanaan pidana mati?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana mati
- b. Untuk diketahuinya pengaturan ideal tentang pelaksanaan terpidana mati

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian berguna untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana khususnya tentang penundaan dalam eksekusi mati.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum

¹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 12

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Muncul prinsip kepastian hukum ditandai dengan kemunculan gagasan negara hukum di Jerman abad ke-19. Gagasan negara hukum, sebagaimana dipahami oleh Hayek, merupakan suatu perwujudan dari aturan hukum, yang berdasarkan pada gagasan kebebasan individu yang dilindungi oleh hak-hak individu untuk membatasi kekuasaan publik. Berdasarkan gagasan kebebasan dan supremasi hukum sebagai dasar prinsip-prinsip umum hukum yang baik, Hayek menyimpulkan, bahwa prinsip kepastian hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Dia menekankan pentingnya prediktabilitas keputusan yudisial dan kontribusinya terhadap kesan keadilan yang menyeluruh dimasyarakat.³

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian

ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁴

2. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan pidana.⁵ Teori teori yang mendukung tujuan pidanaan menurut hukum pidana adalah teori absolut, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat pidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidanaan hanya masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana tersebut.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atas pencegah terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

³ Friedrich Preetz, Does the Notion of Legal Certainty Prohibit an Effects Based Approach to Rebates, *Westlaw Journal*, Volume 3, Nomor 38, hlm. 35.

⁴ T. Saharudin, "Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Riau", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2013, hlm. 14.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 149

masyarakat.⁶ Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.⁷ Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afshirikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*vervetering* atau *reclasing*)
- 3) Bersifat membiasakan (*onschadelijk maken*)

c. Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi dari si penjahat. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat). Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedaan harus memberi kepuasan bagi hakim,

penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁸

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran tentang judul penelitian Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan-batasan tentang judul penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah Penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-sebenarnya; proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya⁹
2. Penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda¹⁰
3. Eksekusi adalah merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan terhadap suatu putusan hakim atau badan peradilan¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹² Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum.

⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 193

⁹ Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997, hlm.403

¹⁰ <https://kbbi.web.id/penundaan>, di akses tanggal 18 februari 2018.

¹¹ <https://kbbi.web.id/eksekusi>, diakses tanggal 18 februari 2018

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.12.

⁶ *Ibid*, hlm. 157

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, agar peneliti lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan dukungan oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer** yaitu hukum mengikat yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964 tentang Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
- 5) Undang-undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Grasi
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

b. **Bahan Hukum Skunder** yaitu bahan hukum yang erat di kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahwa hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel, internet, artikel ilmiah, jurnal, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan

c. **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus tepat untuk menemukan data yang terdapat baik di dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisa data

Setelah data terkumpul maka dilakukan identifikasi data dan inventarisasi data, dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul tersebut, data ini di analisis dengan analisis yuridis kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang yang dihadapkan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek *seharusnya* atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat,

¹³Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makassar, 2014, hlm. 230.

baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat.¹⁴ Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁶ Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.¹⁷ Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan yang tercantum didalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang

menjatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena adanya unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain lain.¹⁹

2. Jenis-Jenis Pidana

Bentuk pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan

1. Pidana (hukuman) pokok;
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, antara lain;
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

3. Tujuan Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁰

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 133.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 141.

¹⁸Syafiruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran" Makalah disampaikan pada *Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatra Utara*, Medan, 27 April 2007, hlm. 4.

¹⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum, Rajawali Pers*, Depok, 2017, hlm. 137

²⁰ Sintia Monika, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*, *Skripsi*, Unriversitas Riau, hlm.33

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

1. Sejarah Tentang Pidana Mati di Indonesia

Undang-undang hukuman mati yang didirikan pertama kali berasal dari abad ke-18 SM dalam Kode Raja Hammurabi dari Babel, yang mengkodifikasi hukuman mati untuk 25 kejahatan yang berbeda. Hukuman mati juga merupakan bagian dari *Code Het* Abad Ke-14 SM; dalam *Draconian Code of Athens* dari Abad Ketujuh SM, yang menjadikan kematian satu-satunya hukuman untuk semua kejahatan; dan pada abad ke lima SM Hukum Romawi tentang Dua Belas Tablet.

2. Sanksi Pidana Mati di Indonesia

Di Indonesia semakin banyak delik yang di ancam pidana mati. Delik yang diancam dengan pidana mati didalam KUHP sudah menjadi Sembilan buah yaitu:²¹

1. Pasal 104 KUHP mekar membunuh kepala negara
2. Pasal 111 ayat (2) mengajak negara asing menyerang Indonesia
3. Pasal 124 ayat (3) memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang

Pasal 124 bis KUHP dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja pekerja dalam perusahaan pertahanan Negara

3. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana mati di Indonesia

Pelaksanaan atau tata cara eksekusi pidana mati diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer serta Peraturan Kepala

²¹ A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.283

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

4. Proses Hukum Hukuman Mati

Setelah melalui proses hukum dari ditetapkan sebagai terdakwa hingga dijatuhi hukuman mati. terpidana mati masih mempunyai upaya terakhir meskipun putusan hukuman mati bersifat final atau berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pengampunan/garasi (*celemency*) ke presiden.²²

Setelah menempuh semua upaya hukum serta telah ditolaknya permohonan grasi dari presiden, tahap selanjutnya adalah eksekusi hukuman mati.²³

5. Penempatan terpidana mati

Terpidana mati selama menjalani proses hukum dari di jatuhi hukuman mati hingga di tolaknya grasi oleh presiden, ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman. Penempatan terpidana dilapas tersebut, berlaku juga bagi terpidana mati. Pada prinsipnya terpidana mati di tempatkan dilapas bersama dengan Warga binaan lainnya bukan dimaksudkan untuk menjalani hukuman, melainkan hanya ditempatkan sementara selama masa tunggu eksekusinya²⁴

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Mati

Pidana mati/hukuman mati (*death penalty*) merupakan salah satu jenis hukuman yang tertua dan paling kontroversial, dilaksanakan oleh pihak

²² <https://www.deathpenalworldwide.org/search-post.cfm?country=Indonesia>, diakses pada tanggal 26 september 2019.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

yang berwenang dengan menghilangkan nyawa pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku penerapan pidana mati didasarkan pada tujuannya untuk mencegah orang lain atau masyarakat melakukan tindak pidana serupa karena takut akan hukuman yang sangat berat.²⁵

Kejaksaan Agung sampai kini belum menjadwalkan eksekusi mati terhadap terpidana teroris Aman Abdurrahman. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejagung Noor Rachmad menuturkan alasannya adalah belum ada pernyataan tertulis bahwa Aman tidak akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dan grasi. Sementara itu, sesuai dengan peraturan perundangan, terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* belum dapat dieksekusi selama belum mengajukan PK dan grasi. Upaya hukum PK dan grasi juga tak memiliki batasan waktu setelah ada putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksekusi pidana mati selama ini dilaksanakan tanpa tersedianya aturan-aturan hukum yang pasti dan konsisten dalam mengatur masa tunggu eksekusi khususnya mengenai jangka waktu eksekusi, baik pada fase pemenuhan hak-hak terpidana mati maupun pada fase pasca penolakan grasi oleh Presiden. Kejaksaan tidak dapat melaksanakan putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap secara konsisten dengan tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati.

B. Pengaturan Ideal Tentang Pelaksanaan Pidana Mati

²⁵ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.190

Ideal merupakan suatu hal yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.²⁶ Sehingga diperlukan suatu konsep ideal suatu peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Pengaturan ideal tentang pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia perlu mendapatkan rujukan dari berbagai negara untuk dijadikan sebagai referensi. Penulis dalam hal ini akan memberikan penjabaran dari beberapa negara asing.

Setelah menempuh semua upaya hukum serta telah ditolaknya permohonan grasi dari presiden, tahap selanjutnya adalah eksekusi hukuman mati. Hukum di Singapura memang tidak mengatur mengenai jangka waktu yang pasti untuk melaksanakan hukuman mati. Masa tunggu eksekusi hukuman mati di dasarkan pada praktik yang selama ini dilakukan, dan biasanya pasca penolakan grasi tidak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melaksanakan hukuman mati. Seperti beberapa kasus tepidana mati yang telah dieksekusi berikut:²⁷

1. Pelaksanaan Hukuman Mati di Singapura

Kejahatan-kejahata yang diancam dengan sanksi hukuman mati dalam Hukum Pidana Singapura diatur dalam "*The Penal Code of Singapore*" atau dikenal sebagai KUHP Singapura. Sejak KUHP Singapura diamandemen pada tahun 2007, Singapura tidak lagi memungkinkan hukuman mati untuk pemerkosaan atau pemberontakan. KUHP singapura telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen), perubahan terakhir yaitu pada

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 946.

²⁷https://en.m.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Singapore, diakses pada tanggal 14 september 2019
https

tahun 2012. Berikut kejahatan-kejahatan yang di jatuhkan sanksi hukuman mati dalam KUHP Singapura.²⁸

Proses peradilan terhadap terpidana yang dijatuhi sanksi hukuman mati dilaksanakan oleh Pengadilan

Tinggi Singapura. Setelah dijatuhi hukuman, terpidana memiliki satu banding ke Pengadilan Banding. Jika banding gagal, terpidana mati masih mempunyai upaya terakhir meskipun putusan hukuman mati bersifat final atau berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pengampunan/garasi (*celemency*) ke presiden.

Setelah menempuh semua upaya hukum serta telah ditolaknya permohonan grasi dari presiden, tahap selanjutnya adalah eksekusi hukuman mati. Hukum di Singapura memang tidak mengatur mengenai jangka waktu yang pasti untuk melaksanakan hukuman mati. Masa tunggu eksekusi hukuman mati di dasarkan pada praktik yang selama ini dilakukan, dan biasanya pasca penolakan grasi tidak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melaksanakan hukuman mati. Seperti beberapa kasus terpidana mati yang telah dieksekusi berikut.²⁹

2. Pelaksanaan Hukuman Mati di Jepang

Sistem hukum Jepang modern didasarkan pada sistem hukum sipil, mengikuti model sistem hukum Eropa abad-19, terutama kode hukum Jerman dan Perancis. Jepang menetapkan

sistem hukumnya ketika pemerintahan kekaisaran ke Jepang dipulihkan pada tahun 1868 sebagai bagian dari Restorasi Meiji. Konstitusi Meiji adalah hukum organik dari kekaisaran Jepang yang berlaku dari tahun 1890 hingga 1945. Setelah Perang Dunia II, ada reformasi hukum utama, dan Konstitusi 1947 disusun di bawah Pendudukan Sekutu, dengan pengaruh Amerika yang signifikan. Sistem hukum Jepang saat ini adalah gabungan dari hukum benua dan Amerika. Baik konsep Hukum Perdata maupun pengaruh Hukum Umum yang lebih baru semuanya dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional Jepang.³⁰

Akan tetapi faktanya hampir tidak pernah terjadi. Dari tahun 2000 hingga 26 Juli 2018, 89 hukuman mati telah dilaksanakan. Rentang waktu terpendek dari hukuman hingga eksekusi adalah satu tahun, sedangkan yang terlama adalah 19 tahun.³¹ Terpidana mati bernama Sadamichi Hirasawa adalah salah satu terpidana mati yang menunggu eksekusinya hingga 32 tahun, ia meninggal dikarenakan sakit pada usia 95 tahun dikarenakan menunggu eksekusi yang terlalu lama.³²

Dalam pengaturan dan pelaksanaan eksekusi terpidana mati, tentunya terdapat persamaan dan perbedaan antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura dan Jepang. Persamaan masa tunggu eksekusi pidana mati antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura, yaitu tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai jangka waktu eksekusi

²⁸ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Singapore, diakses pada tanggal 13 september 2019.

²⁹ https://en.m.wikipedia.org/wiki/capital_punishment_in_singapore, diakses pada tanggal 14 september 2019.

³⁰ <https://libguides.uchastings.edu/japan-law/legal-system-stats>, diakses pada tanggal 16 september 2019.

³¹ <https://www.nippon.com/en/features/h00239/capital-punishment-in-japan.html>, diakses pada tanggal 21 september 2019.

³² https://en.m.wikipedia.org/wiki/sadamichi_hirasawa, diakses pada tanggal 21 september 2019.

terpidana mati. Perbedaannya terdapat dalam praktik yang selama ini telah dilaksanakan. Hukum di Singapura memang tidak mengatur mengenai jangka waktu yang pasti untuk melaksanakan hukuman mati. Biasanya pasca penolakan grasi tidak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati. Berbeda halnya dengan Negara Jepang yang memiliki pengaturan mengenai jangka waktu eksekusi hukuman matinya. Akan tetapi negara Jepang memiliki kesamaan dengan Negara Indonesia dalam praktiknya yang tidak berjalan dengan baik, yang berbeda dengan Negara Singapura.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari, membahas, dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana mati dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum ada aturan yang menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi mati. Penundaan terhadap eksekusi pidana mati yang berlarut-larut memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum, hal tersebut dapat dilihat dari tentang berapa lama terpidana harus menunggu di dalam penjara untuk dieksekusi dan apakah terpidana mati akan di eksekusi atau tidak. Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi pidana mati tentunya bertolak belakang dengan landasan kepastian hukum dari proses penegakan hukum pidana yang berkeadilan.
2. Pengaturan ideal tentang pelaksanaan pidana mati harusnya

segera dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, agar terciptanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana mati hingga masa yang akan datang. Konsep pengaturan ideal tentang pelaksanaan pidana mati dapat dicontoh dari Negara Jepang yang memiliki aturan tentang kapan akan dilaksanakannya eksekusi mati dan Negara Singapura yang tidak menunda-nunda dalam melaksanakan eksekusi mati.

B. Saran

Tidak adanya pengaturan yang tegas dan pasti mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaannya , baik jangka waktu pada fase pemenuhan hak mengajukan hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi, serta pada fase pasca penolakan grasi oleh Presiden. Negara Indonesia perlu membuat aturan :

1. Pengaturan mengenai batasan waktu pada fase pemenuhan hak mengajukan hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi. Karena jika tidak ada batasan waktu dapat menyebabkan eksekusi terpidana mati menjadi tertunda-tunda.
2. Setelah menempuh semua upaya hukum serta telah ditolaknya permohonan grasi dari presiden, tahap selanjutnya adalah eksekusi hukuman mati. Perlu dibuatnya pengaturan jangka waktu pada fase setelah ditolaknya grasi hingga terpidana mati akan dieksekusi. Perlu diatur dengan jelas mengenai berapa lama waktu yang di perlukan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati. Sehingga dengan aturan yang jelas ini maka akan tercapainya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A.Z Farid dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta
- Adam, Aswarni dan Zulfkari Touguan, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alfa Riau, Pekanbaru
- Albert, Donald Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali, Zainudin, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anwar, Yesmil dan adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Atriano Yon Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Arif Zudan Fakrulloh, 2011, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, rineka cipta, Jakarta
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Huda Chairul, 2006 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta
- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang , P.A.F, 1988 *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Mahmud, Peter Marzuki, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makassar.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 2000 *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mulya, Todung Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nawawi, Barda Arief, 2002 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Syahrani, Riduan, 2008 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Triwulan, Titik Tutik, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Van, LJ Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta

- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyo Bambang, 2016 *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia*, Opinio Juri, Jurnal Volume 04 Januari – April 2012
- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Prespektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, no.1, Agustus 2010
- Ferawati, “Urgensi Revhtsvinding dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016
- Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Penerbit Kartika, Surabaya
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014
- Sintia Monika, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*, *Skripsi*, Universitas Riau
- Syafiruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan*

Pemikiran” Makalah disampaikan pada *Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatra Utara*, Medan, 27 April 2007

- T. Saharudin, “Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Riau”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12/drt/1951 tentang senjata api
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964 tentang Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 31 tahun nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi

D. Website

- <https://covesia.com/news/baca/71720/tak-kunjung-dieksekusi-mati->

- efendi-malah-bisnis-narkoba-lagi, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019
- <https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/early-history-of-the-death-penalty>, diakses pada tanggal 24 september 2019
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Singapore, diakses pada tanggal 13 september 2019
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sadamichi_Hirasawa diakses pada tanggal 21 september
- <https://icjr.or.id/death-penalty-policy-in-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 september 2019
- <http://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/>, diakses tanggal 18 maret 2019
- https://id.wikipedia.org/wiki/Aman_Abdurrahman, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_an_mati, diakses tanggal 1 april 2019
- <https://kbbi.web.id/eksekusi> ,diakses tanggal 18 februari 2018
- <https://kbbi.web.id/mati> ,diakses tanggal 18 februari 2018
- <https://kbbi.web.id/penundaan>, diakses tanggal 18 februari 2018
- <https://libguides.uchastings.edu/japan-law/legal-system-stats>, diakses pada tanggal 16 september 2019
- <https://makassar.tribunnews.com/2017/11/21/bersama-ibu-amir-aco-kendalikan-narkoba-dari-lapas-makassar>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019
- <https://nasional.tempo.co/read/1115098/alasan-kejaksaan-agung-belum-bisa-eksekusi-mati-aman-abdurrahman>, diakses tanggal 1 maret 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20180629101627-12-310081/enggan-banding-aman-abdurrahman-tunggu-waktu-eksekusi-mati>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20180518104434-12-299177/rekam-jejak-aman-abdurrahman-singa-tauhid-isis-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019
- <https://news.detik.com/berita/d-4478533/geger-efendi-jualan-sabu-lagi-di-masa-tunggu-eksekusi-mati>, diakses tanggal 1 april 2019
- <https://singaporelegaladvice.com/death-penalty-singapore/&prev=search>, diakses pada tanggal 14 september 2019
- <https://wwabc.net.w.au/news/2005-11-21/singapore-stands-by-hanging>, diakses pada tanggal 13 September 2019
- <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/japan-two-executed/>, diakses pada tanggal 21 september 2019
- <https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Indonesia>, diakses pada tanggal 26 september 2019
- <https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=japan>, diakses pada tanggal 21 september 2019